



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
PENERIMAAN DELEGASI ANGGOTA KOMISI B DPRD KOTA MEDAN
SELASA, 4 MARET 2008**

Tahun Sidang	:	2007-2008
Masa Persidangan	:	III
Jenis	:	Audiensi
Dengan	:	Komisi B DPRD Kota Medan
Sifat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Selasa, 4 Maret 2008
Waktu	:	Pukul 13.30 WIB - selesai
Ketua Rapat	:	Drs. H.N. Serta Ginting
Sekretaris	:	Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	:	Ruang Tamu Pimpinan Komisi IX DPR-RI Gedung Nusantara I Lantai 1 Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	:	Pengaduan masalah pembayaran klaim Askeskin Rs. Dr. Pirngadi Medan
Anggota yang hadir	:	1. Drs. H.N. Serta Ginting (F.PG), 2. Anshory Siregar (F.PKS), 3. Drs. Arisman Zagoto

I. PENDAHULUAN

Audiensi antara Komisi IX DPR RI dengan Komisi B DPRD Kota Medan dibuka pukul 13.³⁰ WIB oleh Drs. H.N. Serta Ginting (F.PG) mewakili Komisi IX DPR-RI.

Maksud kedatangan anggota Komisi B DPRD Kota Medan sebagaimana yang disampaikan Sunardi (Ketua Komisi B) adalah untuk meminta dukungan Komisi IX DPR-RI agar Menteri Kesehatan RI segera melakukan pembayaran klaim Askeskin RS dr. Pirngadi, Medan yang jumlahnya mencapai Rp. 17 milyar.

II. POKOK PEMBICARAAN

Kepada Komisi IX DPR RI, Anggota Komisi B DPRD Kota Medan menyampaikan hal-hal sbb. :

1. Akibat tunggakan Askeskin kepada RS Dr. Pirngadi Medan yang mencapai Rp. 17 milyar (Juni s.d Desember 2007) sampai saat ini belum dibayar oleh Menkes. Akibat hal tersebut maka RS dr. Pirngadi mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu lagi melayani pasien pemegang SKTM dan peserta Askeskin. Dengan tidak adanya pelayanan bagi masyarakat miskin maka dikhawatirkan akan menimbulkan gejala sosial yang semakin luas, mengingat RS tersebut merupakan satu-satunya RS di Medan yang paling lengkap. Selain itu RS dr. Pirngadi tidak hanya melayani masyarakat dari kota Medan tetapi juga melayani masyarakat daerah lain misalnya : Aceh, Tapanuli Selatan, Nias, Langkat dll.
2. Dengan keputusan yang diterapkan RS Dr. Pirngadi Medan untuk tidak melayani pasien Askeskin dan pemegang SKTM maka saat ini pasien dialihkan ke RS Adam Malik, padahal RS dr. Pirngadi merupakan satu-satunya Rumah Sakit di Medan yang sangat lengkap dan mudah dijangkau masyarakat.
3. DPRD dan Pemerintah Kota Medan merasa sangat keberatan apabila harus menutup dana tersebut karena dalam APBD Kota Medan juga sudah dialokasikan dana sebesar Rp. 5 milyar guna memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang ada di Medan. Disamping itu, pasien yang berobat ke RS Dr. Pirngadi bukan hanya masyarakat Medan tetapi kebanyakan masyarakat dari luar kota Medan sehingga tidak tepat apabila Pemda Medan harus menyediakan anggaran yang cukup besar.
4. Untuk pembayaran tunggakan Askeskin ini Komisi B DPRD Kota Medan pernah mendatangi salah satu Dirjen dilingkungan Departemen Kesehatan RI yang berhubungan dengan masalah ini dan dijanjikan akan dibayar sebesar Rp. 2 milyar untuk pembayaran claim bulan Januari dan Februari 2008. Namun demikian untuk bulan Juni s.d. Desember 2007 tidak ada kejelasan pembayarannya sehingga masalah ini dianggap sangat memberatkan dan memerlukan penyelesaian segera. Untuk itu dukungan Komisi IX DPR RI dalam menyelesaikan masalah ini sangat diharapkan.
5. DPRD Kota Medan menyatakan tidak sependapat dengan kebijakan sistem penerapan quota bagi masyarakat miskin di Medan yang ditetapkan Menkes, dimana Medan mendapatkan quota 4200 orang. Hal tersebut sangat tidak sesuai dengan kondisi lapangan karena di RS dr. Pirngadi Medan yang tidak mampu mencapai 10.000 orang

III. TANGGAPAN KOMISI IX DPR RI

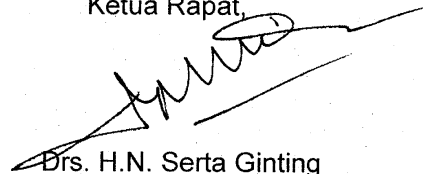
Setelah mendengarkan beberapa masukan yang disampaikan Komisi B DPRD Kota Medan, Komisi IX DPR RI menanggapi sbb. :

1. Komisi IX DPR RI menyatakan bahwa penanganan dan pelayanan Askeskin memang ditemukan banyak permasalahan sehingga Komisi IX DPR RI membentuk Panja Askeskin untuk lebih mendalami permasalahannya sebagai upaya untuk mencari solusi dalam membantu penyelesaian masalah tersebut. Selain itu, mengenai masalah tunggakan klaim Askeskin yang belum dibayar maka Komisi IX DPR RI telah mendesak Menkes dan PT. Askes (Persero) segera menyelesaikannya.

2. Sebagaimana sikap Komisi IX DPR RI yang disampaikan melalui Ketua Komisi IX DPR RI pada Raker dengan Menteri Kesehatan RI bahwa masyarakat miskin harus tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.
3. Semua permasalahan yang disampaikan Komisi B DPRD Kota Medan akan dijadikan masukan Komisi IX DPR RI, khususnya Panja Askeskin dan akan diteruskan kepada Menteri Kesehatan RI.

Jakarta, 4 Maret 2008

Ketua Rapat,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Drs. H.N. Serta Ginting', written over a horizontal line.

Drs. H.N. Serta Ginting